

RENCANA KERJA

(RENJA)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BANYUMAS

2021



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114

Telp. (0281) 631596 Faks. (0281) 631596

Email : satpolpp@banyumaskab.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2022. Renja merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD; RPJMD ; Renstra SKPD; RKPD; dan RENJA SKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu :

” Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri”

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida. Misi yang terkait dan menjadi focus kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas yaitu:

Misi 8: Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2022 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2022 adalah:

1. Menentukan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2022 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagai pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas selama tahun 2022.

I.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika

penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah,** memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,** berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,** berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang startegis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD,** menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan serta penjelasan proses tersebut dilakukan.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,** dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional,** telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, menguraikan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas rancangan awal Renja dapat dilihat dalam matrik renja Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2020 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020. Jumlah anggaran belanja pada APBD Induk Tahun 2020 sebesar Rp. 20.918.112.824,00 terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 14.414.689.906,00 dan belanja langsung Rp. 6.503.422.918,00. Penyerapan anggaran belanja langsung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 5.777.476.465,00 (88,83%) dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 6.503.422.918,00. Program Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran merupakan program dengan serapan anggaran terbesar (96,28%), sedangkan Program Peningkatan Kesadaran Kepatuhan Hukum menunjukkan serapan terkecil yaitu 50,94%.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada tahun anggaran 2020 telah melaksanakan seluruh program yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu terdiri dari 5 program dan 23 kegiatan. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas direpresentasikan oleh capaian indikator kinerja. Rekapitulasi evaluasi hasil kinerja tahun lalu dapat dilihat dalam table T-C.29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Satuan Polisi Pamong Praja**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan	
				Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi
2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	60	12	12
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	60	12	12
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	5	2	1
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai Non ASN	Orang			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dikelola	Bulan			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang memadai	%	60	12	12
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin kantor perangkat daerah yang tersedia	Unit		0	0
Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Pos Damkar yang dibangun	Unit		0	0
Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis		0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan operasional SKPD yang ddipeelihara	Unit		0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target dan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	R
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung pemkab yang dipelihara	Unit		0	0	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit		0	0	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	%		0	0	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi / konsultasi dan pertemuan tingkat provinsi/ pusat yang dilaksanakan	Kali		0	0	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis		0	0	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis		0	0	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistic kantor yang tersedia	Bulan		0	0	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah adiminstrasi keuangan yang dikelola	Jenis		0	0	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang /bulan		0	0	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bulan		0	0	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah adminstrasi kepegawaian yang dikelola	Jenis		0	0	
Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang undangan dibidang cukai yang disampaikan kepada masyarakat dan atau pemangku kepentingan yang dilaksanakan	Kegiatan		0	0	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				0	0	
	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%		0	0	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target dan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	R
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Satu Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kasus		0	0	
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah Patroli Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat meliputi deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan yang dilaksanakan	Kegiatan		0	0	
Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah patrol dan penindakan terhadap penyakit masyarakat dan pedagang kaki lima yang dilaksanakan	Kegiatan		0	0	
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Kegiatan		0	0	
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah petugas Linmas yang diberdayakan dalam tramtibus	Orang		0	0	
	Jumlah bantuan sosial yang tersalurkan	Orang		0	0	
Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah bintek /peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas yang dilaksanakan	Kegiatan		0	0	
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan tramtibus	Kegiatan				
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terpenuhi	Jenis				
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarkat	Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarkat yang tersusun	Dokumen				
Penyediaan Layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan perkada	Persentase penanganan pelanggaran perda	%				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah pelanggar perda / perbup yang tertangani	Kasus				
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah penyuluhan dan sosialisasi penegakan perda dan peraturan bupati	Kegiatan				
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda dan perbup	Kegiatan				
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah operasi penindakan terhadap pelanggar perda dan perbup	Kegiatan				
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten / Kota	Jumlah bintek / pembinaan PPNS yang dilaksanakan	Kegiatan				
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mengikuti bintek / pembinaan	Orang				
PROGRAM PENCEGAHAN PENGANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						
	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%				
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan yang mengancam keselamatan manusia	Kegiatan				
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan /atau mengancam keselamatan manusia	Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan yang mengancam keselamatan manusia	Kegiatan				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan	
				Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi
Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran yang tertangani dengan baik	Bulan			
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran yang tertangani dengan baik	Bulan			
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kegiatan			
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah pemberdayaan penanggulangan bahaya kebakaran (sosialisasi)	Kegiatan			
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kegiatan			
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kegiatan			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	Bulan			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target dan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	
Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang /gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung pemkab yang dipelihara	Unit				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistic kantor yang tersedia	Bulan				

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sesuai urusan Bidang Ketenteraman Masyarakat dan

Ketertiban Umum, Bidang Penegakan Perundang Undangan Daerah dan Bidang Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

2. Dalam melaksanakan tugas Satpol PP menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
 - b. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
 - c. Pembinaan teknis penyelenggaraan bidang kesekretariatan, bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten; bidang kesekretariatan, bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
 - d. Pemantauan penyelenggaraan bidang kesekretariatan, bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang

- menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas terdiri dari:

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat
 - 1) Subbagian Perencanaan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - 3) Subbagian Keuangan
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian
 - 2) Seksi Kerjasama
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat
 - 1) Seksi Satuan Linmas
 - 2) Seksi Bina Potensi dan Pengawasan Dini Masyarakat
- f. UPT Pemadam Kebakaran
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2021

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni anggaran belanja tahun 2021 sebesar Rp 13.770.819.291,- terurai dalam 3 program dan 15 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau meningkat dari tahun 2020, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

No	Indikator	Target	Realisasi		Capaian	Kenaikan/ Penurunan
			2020	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase terpenuhinya aspek kualitas	91%	91.67%	87.50%	100.74%	4.17

	perencanaan					
2.	Tingkat konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran	91%	100%	100%	109.89%	-
3.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	62%	66.67%	50%	107.53%	16.67
4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	77%	94.25%	75%	122.40%	19.25
5.	Persentase implementasi kelitbangan	77%	100%	100%	129.87%	-

Tabel T-C.30
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banyumas**

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021 (s/d Tw2)	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indikator Kinerja Perangkat Daerah											
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	v	v	62 %	65 %	67 %	70 %	66.67 %	0	67 %	70 %	
2	Persentase terpenuhinya aspek kualitas perencanaan		v	91 %	92 %	93 %	95 %	91.67 %	0	93 %	95 %	
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	V		77 %	80 %	82 %	85 %	94.25 %	0	82 %	85 %	
5	Tingkat konsistensi dokumen perencanaan dengan penganggaran			91 %	92 %	93 %	95 %	100 %	0	93 %	95 %	
7	Persentase hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan				75%	80%	85%	0	0	80%	85%	
8	Manajemen Risiko Indeks (MRI)				Level 2	Level 2	Level 3	0	0	Level 2	Level 3	
	Indikator Kinerja Kunci											
1	Persentase kesesuaian capaian kinerja OPD terhadap RPJMD		v	70 %	75 %	80 %	80 %	44.03 %	0	80 %	80 %	
2	Kesesuaian program antar		v	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	0	100 %	100 %	

RENJA TAHUN 2022 SATPOL

dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2021 dapat dikemukakan beberapa hal dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP sebagai berikut:

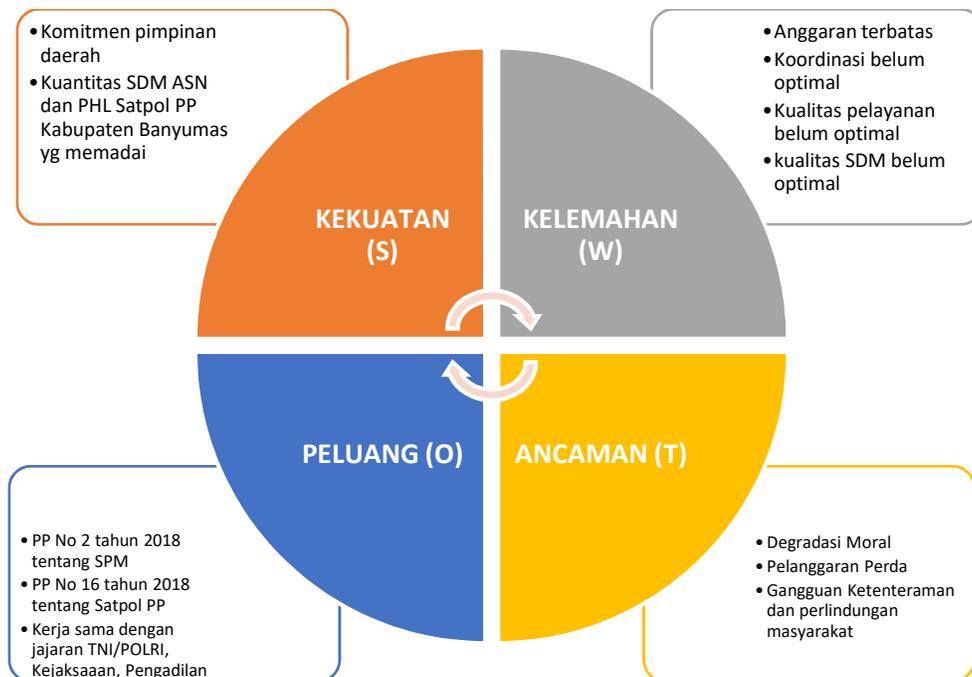
- a. Belum terpenuhinya secara maksimal aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- b. Belum optimalnya penegakan Perda.

Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Satpol PP Kabupaten Banyumas menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treatment). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satpol PP. Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

Perumusan Strategi Menggunakan Metode SWOT

Misi 8
<ul style="list-style-type: none"> •Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius



Strategi atas pemetaan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman dalam lingkup misi membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing, adalah sebagai berikut:

STRATEGI (SO)	STRATEGI (WO)
1. Peningkatan kerjasama dengan jajaran TNI/POLRI, Kejaksaan, Pengadilan dalam menciptakan kondusifitas social;	1. Membuat daftar program prioritas untuk mengatasi keterbatasan anggaran; 2. Meningkatkan koordinasi dengan jajaran samping; 3. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan teknis fungsional
STRATEGI (ST)	STRATEGI (WT)
1. Peningkatan perlindungan sosial masyarakat 2. Peningkatan penegakan Perda dan Perkada	1. Meningkatkan koordinasi internal maupun eksternal untuk mengatasi permasalahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;

Strategi dan arah kebijakan Satpol PP Kabupaten Banyumas untuk periode 2018-2023 dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP Kabupaten Banyumas 2018-2023

RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023

Visi	: Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri		
Misi 8	: Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius		
Tujuan 1	: Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat		
Sasaran 1	: Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman, serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman, serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat dan penegakan peraturan daerah	Meningkatkan ketenteraman dan perlindungan masyarakat
			Meningkatkan penegakan perda dan perkada
			Meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
			Mengembangkan kemampuan Polisi Pamong Praja dan pengetahuan masyarakat
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan standar kualitas pelayanan publik	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
			Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
			Meningkatkan disiplin aparatur
			Meningkatkan pengelolaan data dan informasi

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bappedalitbang dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Satpol PP Kab. Banyumas tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang telah ditempuh Satpol PP Kab. Banyumas adalah sebagai berikut :

- 1) Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya;
- 2) Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (internal business process);
- 3) Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (good governance) dalam jangka panjang; dan
- 4) Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (costeffectiveness) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (allocative efficiency).

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2022. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah. Secara keseluruhan hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada lampiran tabel C-T.31. Rancangan awal RKPD tahun 2022 menunjukkan Satpol PP memiliki 3 program dan 7 kegiatan.

Tabel T-C.31
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Banyumas

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Meningkatnya Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah			Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	%	100	19,849,873,711	100	22,742,735,000	100	22,932,806,000	65,525,414,711	DBHCHT; PAD	
Meningkatnya Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah			Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	%	100	19,849,873,711	100	22,742,735,000	100	22,932,806,000	65,525,414,711	DBHCHT; PAD	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1,720,478,275		2,200,574,000		2,219,383,000	6,140,435,275	PAD	
			Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	1,535,695,000	100	2,040,359,000	100	2,058,665,000	5,634,719,000	PAD	
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1,535,695,000		2,040,359,000		2,058,665,000	5,634,719,000	PAD	

			Jumlah penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kasus	100	1,535,695,000	100	2,040,359,000	100	2,058,665,000		5,634,719,000	PAD
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				257,065,000		301,074,000		303,590,000		861,729,000	PAD
			Jumlah patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dilaksanakan	Keg	50	257,065,000	50	301,074,000	50	303,590,000		861,729,000	PAD
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				39,786,000		100,175,000		100,594,000		240,555,000	PAD
			Jumlah patroli dan penindakan terhadap penyakit masyarakat dan PKL yang dilaksanakan	Keg	50	39,786,000	50	80,175,000	50	80,594,000		200,555,000	PAD
			Jumlah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Keg	0	0	10	20,000,000	10	20,000,000		40,000,000	PAD
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				0		50,000,000		50,000,000		100,000,000	PAD
			Jumlah Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Keg	0	0	3	50,000,000	3	50,000,000		100,000,000	PAD
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				1,185,846,500		1,268,767,000		1,283,550,000		3,738,163,500	PAD
			Jumlah petugas Linmas yang diberdayakan dalam tramtibum	Orang	33	671,367,205	33	867,337,000	33	1,283,550,000		2,822,254,205	PAD
			Jumlah bantuan sosial yang tersalurkan	Orang	150	514,479,295	150	401,430,000	0	0		915,909,295	PAD

		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			0			150,000,000		150,000,000		300,000,000	PAD
		Jumlah Bintek/Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan	Keg	0	0	2		150,000,000	2	150,000,000		300,000,000	PAD
		Jumlah peserta Bintek/Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat	Orang	0	0	120		0	120	0		0	PAD
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum					24,997,500	100,000,000		100,000,000		224,997,500	PAD
		Jumlah Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan tramtibum (PAM)	Keg	50	24,997,500	50		100,000,000	50	100,000,000		224,997,500	PAD
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum					28,000,000	70,343,000		70,931,000		169,274,000	PAD
		Jumlah sarana prasarana tramtibum yang terpenuhi	Jenis	1	28,000,000	5		70,343,000	5	70,931,000		169,274,000	PAD
		Jumlah sarana prasarana tramtibum yang terpelihara	Jenis	0	0	5		0	5	0		0	PAD
		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat					0	0		0		0	
		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada					0	0		0		0	
		Persentase penanganan pelanggaran PERDA	%	100	184,783,275	100		160,215,000	100	160,718,000		505,716,275	PAD
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					184,783,275	160,215,000		160,718,000		505,716,275	PAD

			Jumlah pelanggaran PERDA / Perbup yang tertangani	Kasus	100	184,783,275	100	160,215,000	100	160,718,000		505,716,275	PAD
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				0		0		0		0	
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				50,925,000		60,215,000		60,718,000		171,858,000	PAD
			Jumlah penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar perda dan perbup	Keg	20	50,925,000	20	60,215,000	20	60,718,000		171,858,000	PAD
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				133,858,275		100,000,000		100,000,000		333,858,275	PAD
			Jumlah operasipenindakanterhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Keg	30	133,858,275	30	100,000,000	30	100,000,000		333,858,275	PAD
			Jumlah operasipenindakanterhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Keg	50	0	50	0	50	0		0	PAD
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				0		0		0		0	PAD
			Jumlah Bintek/pembinaan PPNS yg dilaksanakan	Keg		0	1	0	1	0		0	
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				0		0		0		0	
			Jumlah PPNS yang mengikuti Bintek/pembinaan	Orang		0	30	0	30	0		0	PAD
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				0		0		0		0	PAD
			Jumlah PPNS yang mengikuti Bintek/pembinaan	Keg		0	30	0	30	0		0	PAD

		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				1,298,690,300		1,112,962,000		1,323,935,000		3,735,587,300	PAD
			Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)		80	1,298,690,300	80	1,112,962,000	80	1,323,935,000		3,735,587,300	PAD
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1,298,690,300		1,112,962,000		1,323,935,000		3,735,587,300	PAD
			Jumlah sarana prasarana penanggulangan kebakaran yang tersedia	Unit	20	1,298,690,300	20	1,112,962,000	20	1,323,935,000		3,735,587,300	PAD
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0	PAD
			Jumlah Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran yang tertangani dengan baik	Keg	0	0	12	0	12	0		0	PAD
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1,298,690,300		1,112,962,000		1,323,935,000		3,735,587,300	PAD
			Jumlah Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran yang tertangani dengan baik	Keg	30	1,298,690,300	30	1,112,962,000	30	1,323,935,000		3,735,587,300	PAD
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				0		0		0		0	

		Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				0		0		0		0	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				0		0		0		0	
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				0		0		0		0	PAD
			Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Keg		0	30	0	30	0		0	PAD
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				0		0		0		0	PAD
			Jumlah Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Keg	0	0	30	0	30	0		0	PAD
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				0		0		0		0	
			Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Keg		0	4	0	4	0		0	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				0		0		0		0	
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				0		0		0		0	
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				0		0		0		0	

			Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Keg		0	30	0	30	0		0	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16,830,705,136		19,429,199,000		19,389,488,000		55,649,392,136	DBHCHT; PAD
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	0	100	0	100	0		0	
		X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		0		0	
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen		0	4	0	4	0		0	
		X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		0		0	
		X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		0		0	
			Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	13,736,789,258	100	16,301,195,000	100	16,437,432,000		46,475,416,258	PAD
		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13,736,789,258		16,301,195,000		16,437,432,000		46,475,416,258	PAD
			Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	12	13,736,789,258	12	16,301,195,000	12	16,437,432,000		46,475,416,258	PAD
		X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12,832,044,258		15,392,399,000		15,521,041,000		43,745,484,258	PAD
			Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	144	12,832,044,258	144	15,392,399,000	144	15,521,041,000		43,745,484,258	PAD
		X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				904,745,000		908,796,000		916,391,000		2,729,932,000	PAD
			Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	12	904,745,000	12	908,796,000	12	916,391,000		2,729,932,000	PAD

			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	258,420,500	100	531,475,000	100	334,244,000		1,124,139,500	PAD
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				48,081,500		300,158,000		100,995,000		449,234,500	PAD
			Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	5	48,081,500	5	300,158,000	5	100,995,000		449,234,500	PAD
		X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				48,081,500		100,158,000		100,995,000		249,234,500	PAD
			Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Jenis	5	48,081,500	5	100,158,000	5	100,995,000		249,234,500	PAD
		X.XX.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		200,000,000		0		200,000,000	PAD
			Jumlah Pos Damkar yang dibangun	Unit	0	0	1	200,000,000	0	0		200,000,000	PAD
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				210,339,000		231,317,000		233,249,000		674,905,000	PAD
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	10	84,615,000	10	93,976,000	10	94,761,000		273,352,000	PAD
		X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				84,615,000		0		0		84,615,000	PAD
			Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	Jenis	1	84,615,000	0	0	0	0		84,615,000	PAD
		X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		93,976,000		94,761,000		188,737,000	PAD

			Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	0	0	32	93,976,000	32	94,761,000		188,737,000	PAD
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Bulan	2	125,724,000	2	137,341,000	2	138,488,000		401,553,000	PAD
		X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		0	
		X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25,730,000		35,577,000		35,874,000		97,181,000	PAD
			Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	12	25,730,000	12	35,577,000	12	35,874,000		97,181,000	PAD
		X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				99,994,000		101,764,000		102,614,000		304,372,000	PAD
			Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	2	99,994,000	2	101,764,000	2	102,614,000		304,372,000	PAD
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	2,835,495,378	100	2,596,529,000	100	2,617,812,000		8,049,836,378	DBHCHT; PAD
		X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				429,950,000		50,000,000		50,000,000		529,950,000	DBHCHT
			Jumlah administrasi kepegawaian yang dikelola	Jenis	1	429,950,000	1	50,000,000	1	50,000,000		529,950,000	DBHCHT
		X.XX.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				429,950,000		50,000,000		50,000,000		529,950,000	DBHCHT
			Jumlah penyampaian informasi ketentuan peraturan Perundang-Undangan di bidang cukai yang disampaikan kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang dilaksanakan (DBHCHT)	Keg	120	241,925,000	120	50,000,000	120	50,000,000		341,925,000	DBHCHT

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 yang tersedia (DBHCHT)	Unit	1	188,025,000		0		0		188,025,000	DBHCHT
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				208,305,225		341,400,000		344,254,000		893,959,225	PAD
			Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	12	208,305,225	12	341,400,000	12	344,254,000		893,959,225	PAD
		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				133,893,600		190,862,000		192,458,000		517,213,600	PAD
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	133,893,600	12	190,862,000	12	192,458,000		517,213,600	PAD
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				74,411,625		150,538,000		151,796,000		376,745,625	PAD
			Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	12	74,411,625	12	150,538,000	12	151,796,000		376,745,625	PAD
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,197,240,153		2,205,129,000		2,223,558,000		6,625,927,153	PAD
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	5	2,197,240,153	5	2,205,129,000	5	2,223,558,000		6,625,927,153	PAD
		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				91,323,153		91,651,000		92,417,000		275,391,153	PAD
			Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	7	91,323,153	7	91,651,000	7	92,417,000		275,391,153	PAD
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2,105,917,000		2,113,478,000		2,131,141,000		6,350,536,000	PAD
			Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	80	2,105,917,000	80	2,113,478,000	80	2,131,141,000		6,350,536,000	PAD

Purwokerto, 2021
KEPALA SATPOL PP KABUPATEN BANYUMAS

EKO HERU SURONO, S.Sos.
NIP. 19670425 198903 1 005

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan yang melaksanakan perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan di Kab. Banyumas, membantu Bupati Banyumas dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Rencana pembangunan disesuaikan dengan visi misi RPJMD 2018-2023. **"Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri"**

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida. Misi yang terkait dan menjadi fokus kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas yaitu:

Misi 8: Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius

Adapun tujuan dan sasaran dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Banyumas Tahun 2022 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satpol PP Kab. Banyumas tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN
<i>Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan</i>	<i>Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan</i>

III.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Satuan yang membidangi Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, Penegakan Perundang Undangan Daerah dan Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah di Kab. Banyumas. Penyusunan perencanaan sesuai dengan tugas pokok fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mendukung Bupati Banyumas dalam mencapai visi misi yang telah ditetapkan.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai 3 program dan 19 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh tiga bidang dan sekretariat. Berikut merupakan total kebutuhan dana tahun 2022 yaitu Rp 21.932.735.000,00. Berikut lampiran rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023 pada table T-C.33:

Tabel T-C.33

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023
Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Banyumas**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023	
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19.999.700	0	0	19.999.700		0
	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	19.999.700	0	0	19.999.700		0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	4	19.999.700	0	0	19.999.700		0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	1	9.999.900	0	0	9.999.900		0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	9.999.800	0	0	9.999.800		0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0	0			2.223.558.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023	
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai Non ASN	Orang	80	2.113.235.136	0	0	2.113.235.136	2.131.141.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dikelola	Bulan	12	91.650.362	0	0	91.650.362	992.417.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang memadai	%	100	683.568.500	0	0	683.568.500	100.995.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin kantor perangkat daerah yang tersedia	Unit	5	98.646.500	0	0	98.646.500	100.995.000	
Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Pos Damkar yang dibangun	Unit	1	302.962.000	0	0	302.962.000	0	
Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	2	281.960.000	0	0	281.960.000	138.488.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan operasional SKPD yang ddipelihara	Unit	32	144.990.000	0	0	144.990.000	145.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung pemkab yang dipelihara	Unit	2	101.400.000	0	0	101.400.000	102.614.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	12	35.570.000	0	0	35.570.000	35.874.00	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023	
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	%	100	2.829.438.925	0	0	2.829.438.925	344.639.125	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi / konsultasi dan pertemuan tingkat provinsi/ pusat yang dilaksanakan	Kali	12	150.537.900	0	0	150.537.900	151.796.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	12	9.991.730	0	0	9.991.730	0	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis	12	77.640.197	0	0	77.640.197	0	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistic kantor yang tersedia	Bulan	12	111.912.000	0	0	111.912.000	192.843.125	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah adiminstrasi keuangan yang dikelola	Jenis	3	16.301.024.000	0	0	16.301.024.000	16.437.432.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang /bulan	144	15.392.399.000	0	0	15.392.399.000	15.521.041.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	908.625.000	0	0	908.625.000	916.391.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah adminstrasi kepegawaian yang dikelola	Jenis	2	249.376.000	0	0	249.376.000	50.000.000	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023	
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang undangan dibidang cukai yang disampaikan kepada masyarakat dan atau pemangku kepentingan yang dilaksanakan	Kegiatan	120	249.376.000	0	0	249.376.000	50.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				2.098.703.875	0	0	2.098.703.875	2.649.383.000	
	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%	100	1.863.728.000	0	0	1.863.728.000		
Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dalam Satu Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum	kasus	100	1.863.728.000	0	0	1.863.728.000	2.488.665.000	
Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah Patroli Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat meliputi deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan yang dilaksanakan	Kegiatan	50	301.074.000	0	0	301.074.000	403.590.000	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023	
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah patrol dan penindakan terhadap penyakit masyarakat dan pedagang kaki lima yang dilaksanakan	Kegiatan	50	50.175.000	0	0	50.175.000	80.594.000	
Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Kegiatan	2	45.000.000	0	0	45.000.000	45.000.000	
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah petugas Linmas yang diberdayakan dalam tramtibum	Orang	33	890.907.000	0	0	890.907.000	1.733.550.000	
	Jumlah bantuan sosial yang tersalurkan	Orang	150	401.430.000	0	0	401.430.000		
Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah bintek /peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas yang dilaksanakan	Kegiatan	1	49.900.000	0	0	49.900.000	50.000.000	
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan tramtibum	Kegiatan	50	50.150.000	0	0	50.150.000	100.000.000	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023	
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terpenuhi	Jenis	5	70.092.000	0	0	70.092.000	70.931.000	
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang tersusun	Dokumen	5	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	
Penyediaan Layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan perkada	Persentase penanganan pelanggaran perda	%	100	234.975.875	0	0	234.975.875	0	
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah pelanggar perda / perbup yang tertangani	Kasus	100	209.990.000	0	0	209.990.000	160.718.000	
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah penyuluhan dan sosialisasi penegakan perda dsn peraturan bupati	Kegiatan	1	49.990.000	0	0	49.990.000	0	
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda dan perbup	Kegiatan	20	60.000.000	0	0	60.000.000	60.718.000	
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah operasi penindakan terhadap pelanggar perda dan perbup	Kegiatan	30	100.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000	
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten / Kota	Jumlah bintek / pembinaan PPNS yang dilaksanakan	Kegiatan	1	24.985.875	0	0	24.985.875	0	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023	
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mengikuti bintek / pembinaan	Orang	30	24.985.875	0	0	24.985.875	0	
PROGRAM PENCEGAHAN PENGANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				1.080.000.000	0	0	1.080.000.000		
	Tingkat Waktu Tanggap (Renpons Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	80	1.080.000.000	0	0	1.080.000.000		
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan yang mengancam keselamatan manusia	Kegiatan	20	20.000.000	0	0	20.000.000		
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan /atau mengancam keselamatan manusia	Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan yang mengancam keselamatan manusia	Kegiatan	20	20.000.000	0	0	20.000.000		
Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran yang tertangani dengan baik	Bulan	12	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023	
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana						
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran yang tertangani dengan baik	Bulan	12	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000		
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kegiatan	1	20.000.000	0	0	20.000.000		
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah pemberdayaan penanggulangan bahaya kebakaran (sosialisasi)	Kegiatan	1	20.000.000	0	0	20.000.000		
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kegiatan	20	20.000.000	0	0	20.000.000		
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kegiatan	20	20.000.000	0	0	20.000.000		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				156.993.540	0	0	156.993.540		
	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	156.993.540	0	0	156.993.540		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023	
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	5	74.553.760	0	0	74.553.760		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	Bulan	12	74.553.760	0	0	74.553.760		
Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang /gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	2	25.188.780	0	0	25.188.780		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung pemkab yang dipelihara	Unit	4	19.650.000	0	0	19.650.000		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	12	5.538.780	0	0	5.538.780		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	57.251.000	0	0	57.251.000		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis	12	25.100.500	0	0	25.100.500		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistic kantor yang tersedia	Bulan	12	32.150.500	0	0	32.150.500		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Kabupaten Banyumas Tahun 2022 ditunjukkan pada lampiran matrik renja yang telah disesuaikan dengan Renstra Perubahan 2018-2023 sebagai berikut:

Matrik Tahun 2022 berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Kabupaten Banyumas

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0			
	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	19.999.700	0	0	19.999.700	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	4	19.999.700	0	0	19.999.700	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	1	9.999.900	0	0	9.999.900	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	9.999.800	0	0	9.999.800	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai Non ASN	Orang	80	2.113.235.136	0	0	2.113.235.136	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dikelola	Bulan	12	91.650.362	0	0	91.650.362	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang memadai	%	100	683.568.500	0	0	683.568.500	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin kantor perangkat daerah yang tersedia	Unit	5	98.646.500	0	0	98.646.500	
Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Pos Damkar yang dibangun	Unit	1	302.962.000	0	0	302.962.000	
Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	2	281.960.000	0	0	281.960.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan operasional SKPD yang ddipelihara	Unit	32	144.990.000	0	0	144.990.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung pemkab yang dipelihara	Unit	2	101.400.000	0	0	101.400.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	12	35.570.000	0	0	35.570.000	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	%	100	2.829.438.925	0	0	2.829.438.925	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi / konsultasi dan pertemuan tingkat provinsi/ pusat yang dilaksanakan	Kali	12	150.537.900	0	0	150.537.900	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	12	9.991.730	0	0	9.991.730	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis	12	77.640.197	0	0	77.640.197	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistic kantor yang tersedia	Bulan	12	111.912.000	0	0	111.912.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah adiminstrasi keuangan yang dikelola	Jenis	3	16.301.024.000	0	0	16.301.024.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang /bulan	144	15.392.399.000	0	0	15.392.399.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	908.625.000	0	0	908.625.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah adminstrasi kepegawaian yang dikelola	Jenis	2	249.376.000	0	0	249.376.000	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total	
Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang undangan dibidang cukai yang disampaikan kepada masyarakat dan atau pemangku kepentingan yang dilaksanakan	Kegiatan	120	249.376.000	0	0	249.376.000	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				2.098.703.875	0	0	2.098.703.875	
	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%	100	1.863.728.000	0	0	1.863.728.000	
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Satu Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kasus	100	1.863.728.000	0	0	1.863.728.000	
Pencegahan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah Patroli Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat meliputi deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan yang dilaksanakan	Kegiatan	50	301.074.000	0	0	301.074.000	
Penindakan atas Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan	Jumlah patrol dan penindakan terhadap penyakit masyarakat dan pedagang kaki	Kegiatan	50	50.175.000	0	0	50.175.000	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total	
Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	lima yang dilaksanakan							
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Kegiatan	2	45.000.000	0	0	45.000.000	
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah petugas Linmas yang diberdayakan dalam tramtibum	Orang	33	890.907.000	0	0	890.907.000	
	Jumlah bantuan sosial yang tersalurkan	Orang	150	401.430.000	0	0	401.430.000	
Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah bintek /peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas yang dilaksanakan	Kegiatan	1	49.900.000	0	0	49.900.000	
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan tramtibum	Kegiatan	50	50.150.000	0	0	50.150.000	
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terpenuhi	Jenis	5	70.092.000	0	0	70.092.000	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total	
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang tersusun	Dokumen	5	5.000.000	0	0	5.000.000	
Penyediaan Layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan perkara	Persentase penanganan pelanggaran perda	%	100	234.975.875	0	0	234.975.875	
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah pelanggar perda / perbup yang tertangani	Kasus	100	209.990.000	0	0	209.990.000	
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah penyuluhan dan sosialisasi penegakan perda dsn peraturan bupati	Kegiatan	1	49.990.000	0	0	49.990.000	
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda dan perbup	Kegiatan	20	60.000.000	0	0	60.000.000	
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah operasi penindakan terhadap pelanggar perda dan perbup	Kegiatan	30	100.000.000	0	0	100.000.000	
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten / Kota	Jumlah bintek / pembinaan PPNS yang dilaksanakan	Kegiatan	1	24.985.875	0	0	24.985.875	
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mengikuti bintek / pembinaan	Orang	30	24.985.875	0	0	24.985.875	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total	
PROGRAM PENCEGAHAN PENGANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				1.080.000.000	0	0	1.080.000.000	
	Tingkat Waktu Tanggap (Renpons Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	80	1.080.000.000	0	0	1.080.000.000	
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan yang mengancam keselamatan manusia	Kegiatan	20	20.000.000	0	0	20.000.000	
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan /atau mengancam keselamatan manusia	Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan yang mengancam keselamatan manusia	Kegiatan	20	20.000.000	0	0	20.000.000	
Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran yang tertangani dengan baik	Bulan	12	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran yang tertangani dengan baik	Bulan	12	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kegiatan	1	20.000.000	0	0	20.000.000	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah pemberdayaan penanggulangan bahaya kebakaran (sosialisasi)	Kegiatan	1	20.000.000	0	0	20.000.000	
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kegiatan	20	20.000.000	0	0	20.000.000	
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kegiatan	20	20.000.000	0	0	20.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				156.993.540	0	0	156.993.540	
	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	156.993.540	0	0	156.993.540	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	5	74.553.760	0	0	74.553.760	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	Bulan	12	74.553.760	0	0	74.553.760	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total	
Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang /gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	2	25.188.780	0	0	25.188.780	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung pemkab yang dipelihara	Unit	4	19.650.000	0	0	19.650.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	12	5.538.780	0	0	5.538.780	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	57.251.000	0	0	57.251.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis	12	25.100.500	0	0	25.100.500	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistic kantor yang tersedia	Bulan	12	32.150.500	0	0	32.150.500	

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas tahun 2022, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Banyumas tahun 2022 dan Rencana Strategis Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra Perubahan-OPD) Tahun 2018-2023 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya.
3. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022.
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Kabupaten Banyumas Tahun 2022 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju **“Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”**.


KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS
SATPOL PP
EKO HERU SURONO, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670425 198903 1 005